

Persepsi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Wakhidah Heny Suryaningsih¹, Hartuti Purnaweni², dan Muniffatul Izzati³

^{1,2,3} Magister Ilmu lingkungan Undip

ABSTRACT

Salah satu permasalahan kehutanan Indonesia yaitu meluasnya lahan kritis yang mengakibatkan kurangnya produktivitas lahan dan menimbulkan bencana baik banjir maupun tanah longsor. Pemerintah meluncurkan program-program untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diantaranya dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui hutan rakyat.

Hutan Rakyat Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dibangun atas inisiatif beberapa warga untuk mengatasi lahan kritis dan longsor di wilayah tersebut sejak tahun 1964. Hingga saat ini, keberadaan hutan rakyat tersebut masih tetap dijaga dan dilestarikan. Dalam rangka pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan perlu diketahui persepsi masyarakat dalam upaya pelestariannya.

Persepsi masyarakat tentang hutan rakyat adalah masyarakat memandang bahwa hutan rakyat harus tetap dijaga dan diletarikan. Masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang hutan rakyat dan fungsi-fungsinya serta Undang-Undang/peraturan tentang hutan. Pengetahuan ini didapat dari penyuluhan dan dari pengurus kelompok tani. Penyuluhan ini dilakukan oleh penyuluh Kehutanan dari Instansi Kehutanan serta Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Undang-Undang kehutanan ini dianggap relevan, mudah diterapkan dan penting untuk diketahui.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan yang turun temurun serta mata pencaharian sebagai petani.

Keywords : Persepsi, Hutan Rakyat, Pelestarian

1. PENGANTAR

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire dan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Fungsi hutan menurut Suparmoko (1997) di antaranya adalah Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah ; Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi ; Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik ; Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata; serta Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.

Namun hutan di Indonesia menghadapi permasalahan serius yaitu degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan melalui hutan rakyat. Salah satu pola rehabilitasi lahan kritis secara vegetasi adalah dengan membangun hutan rakyat. Melalui pembangunan hutan rakyat akan terjadi peningkatan produktivitas lahan serta menunjang konservasi tanah dan air (Andayani, 1995) Pengembangan hutan rakyat telah lama dilakukan oleh masyarakat meski belum ada kebijakan yang mengaturnya. Masyarakat di daerah Jawa menanam lahan kering dengan pola campuran atau tumpang sari dengan mengkombinasikan tanaman keras/kayu-kayuan dengan tanaman pangan(umbi-umbian), buah-buahan dan empon-empon. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh keuntungan ganda dari hasil kayu dan tanaman pangan tersebut. Pola percampuran berbagai jenis tanaman dalam satu lahan (mix plantation) memiliki nilai lebih bagi petani. Pola ini untuk menyikapi dan mengantisipasi ketidakstabilan produk-produk pertanian. Jika salah satu produk harganya jatuh maka akan tertutupi harga produk lain yang stabil atau bahkan meningkat harganya. Aneka jenis tanaman dan musim panen yang berbeda-beda juga mencerminkan prinsip kelestarian hasil (Jariyah dan Wahyuningrum, 2008)

Keberadaan Hutan Rakyat di desa Karangrejo Kecamatan Loano didasari oleh pemikiran bahwa hutan rakyat menjadi sumber daya alam di daerah tinggi dan menjadi zona pengaman untuk mencegah erosi dan sumber air alam yang harus dipelihara untuk melindungi DAS Bogowonto. Kecamatan Loano masuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto Hulu yang merupakan DAS Prioritas I karena memiliki lahan kritis cukup luas. Berdasarkan data Statistik Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, tahun 2005, menyebutkan bahwa sekitar 14,98% dari luasan DAS Bogowonto sebesar 53.423,86 Ha, dalam kondisi kritis dan 34,58% dalam kondisi agak kritis. Lahan kritis menjadi salah satu indikator suatu DAS mengalami degradasi (Paimin, dkk, 2006).

Hutan rakyat tersebut tetap dijaga dan dilestarikan hingga kini oleh masyarakat. Dalam rangka pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan diperlukan kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan rakyat di desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

1.2. Rumusan Masalah

Keberadaan hutan rakyat menjadi salah satu upaya konservasi sumber daya alam terutama tanah, air serta vegetasi. Perlu diketahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap hutan rakyat, mengapa masyarakat tetap melestarikan hutan rakyat, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka melakukannya serta bagaimana mereka melakukannya. Dari uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana persepsi masyarakat dalam upaya pelestarian Hutan Rakyat Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Mengkaji persepsi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dan waktu penelitian dilakuka pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2012. Lokasi dipilih karena masyarakat desa Karangrejo telah mengembangkan hutan rakyat sejak tahun 1964 yang masih tetap dijaga dan dilestarikan.

Tabel 1. Fenomena dan Indikator Penelitian

| Fenomena | Indikator | Metode |
|--|---|-----------------------|
| Persepsi Masyarakat tentang Hutan Rakyat | ✓ Hutan Rakyat ✓ Urgensi Hutan Rakyat | Wawancara |
| Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat | ✓ Peraturan tentang Hutan Rakyat ✓ Penyuluhan/sosialisasi Hutan Rakyat | Wawancara, Dokumen |

Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu orang-orang yang berkompeten dan terlibat langsung dalam upaya pelestarian hutan rakyat di desa Karangrejo, terdiri dari 25 orang masyarakat yaitu perngkat desa, Tokoh Masyarakat, Kelompok Tani Murababi (Pengurus dan Anggota) seta masyarakat di luar Kelompok Tani dan 4 orang dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan serta Pusat Kajian Hutan Rakyat Universitas Gadjah Mada (PKHR UGM)

Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen, laporan kegiatan, peraturan, dan dokumentasi. Data – data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Karangrejo berada di kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dan lokasinya berbatasan langsung dengan sungai Bogowonto di sebelah Barat. Desa Karangrejo beriklim tropis dengan 2 (dua) musim di sepanjang tahun yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata 28°C - 32°C pada siang hari, sedangkan pada malam hari suhu akan turun mencapai 20°C. Suhu terdingin dapat dirasakan pada bulan Juli- September. Desa Karangrejo berada pada ketinggian 150 mdpl dengan topogarfi desa terdiri dari dataran rendah dan perbukitan dengan tingkat kemiringan 0-30°. Dataran rendah digunakan untuk lahan pertanian sawah, sedangkan perbukitan untuk tegalan dan hutan.

Luas desa Karangrejo mencapai 502,573 ha yang terdiri dari 77 ha sawah, 12 ha pekarangan/tegalan, 22,68 ha pemukiman, 171 hutan rakyat dan sisanya areal penggunaan lainnya. Penduduk desa Karangrejo berjumlah 1.854 orang terbagi menjadi 448 KK. Mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani yaitu 392 KK. Sedangkan lainnya bekerja sebagai buruh, pegawai/TNI/Polri, pedagang dan swasta. Masyarakat desa Karangrejo mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (pasca sarjana). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat yang lulus Sekolah Dasar sebesar 35,2% ; lulus SMP sebesar 26,3%, lulus SMA sebesar 16% dan Sarjana/Pascasarjana sebesar 2,1%, sedangkan lainnya tidak atau belum sekolah.

Masyarakat desa Karangrejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil pertanian khususnya pada (sawah) dan sebagian besar warga berpendidikan SD dan

SMP. Meskipun memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah namun masyarakat memiliki kepedulian terhadap sumber daya alam desanya, salah satunya hutan rakyat yang mereka bangun secara swadaya. Kepedulian terhadap sumber daya alam ini tertuang dalam visi dan misi masyarakat desa Karangrejo sebagai berikut :

Visi masyarakat desa Karangrejo :

'Peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera'.

Misi Masyarakat desa Karangrejo :

1. Menciptakan lingkungan yang asri dan bermanfaat.
2. Membentuk kelompok-kelompok tani (kelompok induk)
3. Melestarikan hutan rakyat dengan tidak melakukan penebangan secara liar
4. Adanya pendampingan dan kemitraan dengan pihak luar : Instansi/Dinas Terkait, LSM, Penyuluh Kehutanan, Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi

Keberhasilan dalam melestarikan sumber daya alam khususnya hutan rakyat mendapat apresiasi dan penghargaan dari pemerintah, melihat prestasi yang telah dicapai dengan memenangkan berbagai perlombaan tentang Hutan Rakyat maupun Penghijauan Lingkungan.

Hutan rakyat desa Karangrejo dikembangkan masyarakat secara swadaya dan saat ini luasnya mencapai 171 ha. Hutan rakyat tersebut memiliki struktur yang kompleks, dengan kondisi tegakan yang rapat menyebabkan terbentuknya lapisan atau strata hutan yang lengkap. Lapisan kanopi menduduki lapisan tertinggi yang didominasi oleh jenis mahoni dan jenis lainnya seperti Jati, Sengon, Durian, Kelapa, bambu, petai, sonokeling, dan melinjo dengan ketinggian pohon lebih dari 10 meter. Di samping menanam pepohonan, masyarakat juga menanam nanas, singkong, umbi-umbian dan tanaman empon-empon untuk memanfaatkan ruang di bawah tegakan. Tanaman empon-empon yang dibudidayakan antara lain kapulaga, temu lawak, kunyit, dan temu giring.

3.2. Persepsi Masyarakat tentang Hutan Rakyat

Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama (Rakhmat,2003)

Persepsi masyarakat tentang hutan rakyat dapat diketahui melalui bagaimana pengetahuan mereka tentang hutan dan fungsi hutan tersebut bagi kehidupan mereka. Dari 25 informan masyarakat desa Karangrejo 88% mengetahui tentang hutan rakyat dan hanya 12% yang tidak tahu. Hutan rakyat menurut pengetahuan masyarakat yaitu hutan yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya atau hutan yang dimiliki masyarakat dan dikembangkan sendiri atau ditanami sendiri oleh mereka. Masyarakat secara sengaja melakukan penanaman pohon pada lahan milik dan di sela-sela tanaman pohon tersebut mereka juga menanam tanaman lain seperti empon-empon dan bahan pangan seperti singkong. Namun mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa kegiatan tersebut adalah merupakan hutan rakyat dengan sistem campuran atau yang mereka kenal dengan sistem tumpang sari

Pengetahuan tentang hutan rakyat mereka dapat dari kegiatan penyuluhan oleh instansi pemerintah atau penyuluh kehutanan yaitu 68 % dan dari pengurus kelompok tani 32 %.

Secara umum hutan rakyat bagi masyarakat berfungsi sebagai penahan erosi dan menyediakan sumber mata air, di samping fungsi ekonomi dan sosial. Hutan rakyat menurut masyarakat Desa Karangrejo memiliki fungsi-fungsi seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. Fungsi Hutan Rakyat Menurut Masyarakat Desa Karangrejo

| No | Fungsi | Uraian fungsi | Jumlah (%) |
|----|---------|-------------------------------|------------|
| 1 | Ekologi | - Mengatasi lahan kritis | 100 |
| | | - Sumber mata air | 100 |
| | | - Mencegah bencana banjir | 36 |
| | | - Mencegah longsor | 36 |
| | | - Konservasi/menahan erosi | 16 |
| 2 | Ekonomi | - Pendapatan Masyarakat | 96 |
| | | - Kesempatan Berusaha | 92 |
| | | - Tabungan/Investasi | 64 |
| | | - Mencukupi kebutuhan sendiri | 12 |
| 3 | Sosial | - Membuka lapangan kerja | 100 |
| | | - Kerjasama dengan pihak lain | 80 |

| | | |
|--|---------------------|----|
| | - Ekowisata | 32 |
| | - Hutan Percontohan | 4 |

Sumber data : Analisis data primer

Keberadaan hutan rakyat di desa Karangrejo menurut masyarakat secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan analisis data primer, 88% informan menganggap hutan rakyat telah berfungsi dan keberadaannya sangat bermanfaat dalam mendukung kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan 1) Masyarakat melihat fakta pada lahan-lahan mereka yang dulunya kritis, gersang, gundul dan tandus telah berubah menjadi hijau ; 2) Dengan dikembangkannya hutan rakyat masyarakat tidak kesulitan air bersih terutama pada musim kemarau, sehingga fungsi hutan dalam menjamin ketersediaan air sudah dapat dirasakan mereka. 3) Kebutuhan masyarakat akan kayu baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar, dan bahan kerajinan untuk perabotan rumah tangga juga tercukupi. dan 4) Sebagian besar masyarakat menganggap hutan rakyat sudah berfungsi karena sudah terbukti bahwa hutan rakyat desa Karangrejo sering mendapat penghargaan dan menjadi juara lomba penghijauan baik tingkat kabupaten Purworejo maupun provinsi Jawa Tengah.

Namun ada warga masyarakat yang menganggap hutan rakyat belum dapat berfungsi secara optimal yaitu (12%) dari informan yang terdiri dari pengurus kelompok tani dan masyarakat di luar kelompok tani , hal ini dikarenakan hutan rakyat tersebut belum dapat berdampak besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta masih adanya penebangan dini.

3.3. Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat

Pengelolaan hutan rakyat yang menyangkut peraturan dan perundang-undangannya yaitu khususnya Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam UU pasal 1 tersebut menyatakan bahwa hutan hak (lebih dikenal dengan hutan rakyat) adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Lebih dari separuh informan (56%) mengetahui UU tersebut dan selebihnya tidak tahu. Masyarakat mengetahui UU tersebut melalui penyuluhan, media massa, pengurus kelompok tani maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan instansi kehutanan dan pihak universitas. Penyuluhan dilakukan Penyuluh Kehutanan serta PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) yang terdiri dari Kepala Desa, Kelompok Tani di desa Karangrejo. Penyuluhan dilakukan selapanan (35 hari) sekali.

Informan mengakui bahwa kegiatan penyuluhan tentang hutan rakyat tersebut sangat bermanfaat, penting untuk diketahui masyarakat, dan relevan dengan kegiatan hutan rakyat yang mereka kembangkan. Dengan kegiatan penyuluhan ini maka masyarakat menjadi lebih memahami arti penting keberadaan hutan rakyat di desanya. Materi dari penyuluhan selain mengenai peraturan tentang hutan rakyat diantaranya yaitu tentang pembibitan, manfaat hutan rakyat, pentingnya ketersediaan air, pelestarian hutan dan konservasi.

3.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Rakyat

Persepsi masyarakat menurut Rakhmat (2003) dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (kebaruan, perulangan) dan internal (minat, kondisi biologis, dan kebiasaan) Persepsi masyarakat desa Karangrejo mengenai hutan rakyat dan kebijakan pengelolaan hutan rakyat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1) Pendidikan masyarakat yang relatif rendah yaitu sebagian besar hanya mengenyam Sekolah Dasar /SD dan Sekolah Menengah Pertama/SMP sebesar 61,5%. Hal ini mempengaruhi proses penerimaan masyarakat terhadap informasi sehingga wawasan pengetahuan mereka terbatas serta mempengaruhi proses penyuluhan dan pembinaan dari Penyuluh Kehutanan setempat dalam memahami materi yang diberikan. Dari hasil wawancara dengan penyuluh, masyarakat tidak dapat memahami secara langsung materi, dan penyuluh harus mengulangi sampai beberapa kali. 2) Pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun, khususnya berkaitan dengan pelestarian hutan rakyat. Masyarakat memandang bahwa hutan perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi bencana longsor dan kekeringan. 3) Sebagian besar masyarakat (87,5%) bermata pencaharian sebagai petani sehingga ketergantungan terhadap lahan dan ketersediaan air sangat tinggi. Hutan diperlukan agar air tetap ada meskipun pada musim kemarau dan mereka dapat terus mengolah lahannya sehingga dapat berproduksi.

4. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Masyarakat desa Karangrejo memiliki persepsi bahwa hutan rakyat yang mereka miliki dan kelola harus tetap dijaga dan dilestarikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelestarian hutan rakyat tersebut dimaksudkan agar dapat berfungsi optimal menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
- Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun, serta mata pencaharian masyarakat sebagai petani.

5. REFERENSI

Andayani, Wahyu. 1995. *Hutan Rakyat dan Peranannya dalam Pembangunan Daerah*. Majalah Kehutanan Indonesia. No.6.p: 32-46.

Jariyah, Nur Ainun dan Wahyuningrum, Nining, 2008. *Karakteristik Hutan Rakyat di Jawa*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol %No. 1, Maret 2008 hal.43-56

Paimin, Sukresno, Purwanto. 2006. *Sidik Cepat Degradasi Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS)*. Bogor: Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam.

PKHR UGM, 2005. Hasil survei Pengelolaan HR di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Rekam proses workshop pembangun visi bersama dalam pengelolaan Hutan Rakyat

Rakhmat, Jalalludin, 2003. *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Penerbit BPFE YOGYAKARTA, 1997 Yogyakarta

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan